

**DISPARITAS SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

Oleh:

I WAYAN FRANSIS PUTRA ADIGUNA

201910117001



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : DISPARITAS SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA
GOLONGAN I BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA.

Nama Mahasiswa : I WAYAN FRANSIS PUTRA ADIGUNA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910117001

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Juli 2023


MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.
NIDK. 8802323419

Pembimbing II



Rama Dhiyanti, S.H., M.H.
NIDN. 030107304

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : DISPARITAS SANKSI PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA
PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA
GOLONGAN I BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA

Nama Mahasiswa : I WAYAN FRANSIS PUTRA ADIGUNA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910117001

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 21 Juli 2023

Jakarta, Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

Penguji I : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN. 0313046804

Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.
NIDK. 8802323419

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Pitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : DISPARITAS SANKSI PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PERANTARA JUAL BELI
NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA

Nama : I WAYAN FRANISIS PUTRA ADIGUNA

NPM : 201910117001

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Disparitas Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



I Wayan Fransis Putra Adiguna

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Fransis Putra Adiguna

NPM : 201910117001

TTL : Denpasar, 27 September 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“DISPARITAS SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Yang Membuat pernyataan,



I WAYAN FRANISIS PUTRA ADIGUNA

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan masalah serius yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi perhatian bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana narkotika semakin marak dan bahkan para pelaku narkotika tidak takut dengan adanya sanksi pidana yang akan menyertainya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika adalah salah satunya dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Akan tetapi, masih terdapat disparitas hukuman dalam putusan hukum di pengadilan khususnya tentang pembuktian Narkotika Terkait tindak pidana perantara jual beli narkotika golongan I sebagai contoh Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN.Rantauprapat dan Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, Adapun metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan sumber data dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Substansi hukum, berdasarkan ancaman pidana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan batasan pidana penjara minimum dan maksimum kepada pelaku panyalahguna narkotika; Struktur Hukum, berdasarkan kebebasan Hakim menurut UU Kekuasaan Kehakiman dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku penyalahguna narkotika; Budaya hukum, berdasarkan adanya perilaku atau kebiasaan Hakim dalam mengadili pelaku penyalahguna narkotika; Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana yaitu keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan, latar belakang perbuatan terdakwa dan tujuan pemidanaan. Upaya penanggulangan terhadap disparitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu melalui kebijakan hukum pidana oleh pembuat undang-undang dan peran Majelis Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan juga memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat

Kata kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Disparitas Putusan

ABSTRACT

Narcotics crime is a big problem that is becoming a popular topic as well as being of concern to the Indonesian nation today. Narcotics crimes are increasingly widespread and even narcotics perpetrators are not afraid of the criminal sanctions that will accompany them. The abuse and illicit trafficking of narcotics has been proven to have damaged the future of the nation in any country, damaged human character, damaged the physical and health of the community, and in the long run has the potential to greatly disrupt the competitiveness and progress of a nation. As for the government's efforts to prevent and deal with narcotics crimes, one of them is by making and legalizing Law Number 35 of 2009. However, there is still a disparity in penalties in decisions regarding Narcotics Related to the criminal act of intermediary buying and selling of class I narcotics in Decision Number 18/Pid.Sus/2022/PN.Rantauprapat Decision Number 955/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Tim, The research method uses normative juridical research methods or library research (library research) using data sources from written materials that has relevance to the problem of this research.

The results of the study show that the factors causing disparity in the imposition of criminal sanctions on the perpetrators of the criminal act of intermediary buying and selling of class I narcotics based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely: Substance, based on criminal threats in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which provides a minimum and maximum prison term for narcotics abusers; Structure, based on the freedom of the Panel of Judges protected by the Judicial Powers Law in imposing criminal sanctions on narcotics abusers; Legal culture, based on the behavior or habits of the Panel of Judges in considering and deciding on narcotics abusers; Other factors that cause disparities in the imposition of criminal sanctions are aggravating and mitigating circumstances, the background of the defendant's actions and the purpose of sentencing. While efforts to overcome the disparity in criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of intermediary buying and selling of class I narcotics based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely through criminal law policies by legislators and the role of the Panel of Judges are obliged to explore, follow and also understand legal values and a sense of justice that lives in society

Keywords: *Crime, Narcotics, Disparity of Decisions*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “DISPARITAS SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Rahman Amin, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Rama Dhiyanti, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Konseptual	9
1.6. Kerangka Teoritis	10
1.7. Kerangka Pemikiran	16
1.8. Penelitian Terdahulu	17
1.9. Metode Penelitian	18

BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	22
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	22
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana	24
2.2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika	25
2.2.1. Pengertian Narkotika	25
2.2.2. Tindak Pidana Narkotika	28
2.2.3. Pelaku Tindak Pidana Narkotika	33
2.2.4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	34
2.3. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	39

BAB III TINJAUAN TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

- 3.1. Pengertian Putusan Hakim..... 42
- 3.2. Jenis-jenis Putusan Hakim..... 47
- 3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Pidana Oleh Hakim .. 60

BAB IV PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA

- 4.1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 64
- 4.2. Upaya Penanggulangan Terhadap Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- 5.1. Kesimpulan..... 94
- 5.2. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP